

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS BIAYA PENGOLAHAN
LIMBAH PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III
(PERSERO) MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

EKA YUSDIANTARI
NPM. 1405170314

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2019, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : **EKA YUSDIANTARI**
N.P.M : **1405170314**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS BIAYA
PENGOLAHAN LIMBAH PADA PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN**

Dinyatakan : **(B)** *Lulus dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

FITRIANI SARAGIH, S.E, M.SI.

EDISAH PUTRA N, S.E, M.AK

UMSU

ELIZAR SINAMBELA, S.E, M.SI.

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

H. JANURI, SE, MM, M.Si

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : EKA YUSDANTARI
N P M : 1405170314
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS BIAYA
PENGOLAHAN LIMBAH PADA PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

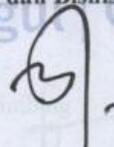
Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

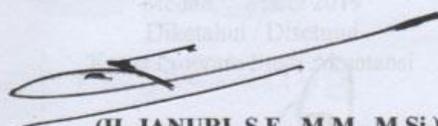

(ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si.)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kap. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : EKA YUSDIANTARI
N.P.M : 1405170314
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Penelitian : ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS BIAYA
PENGOLAHAN LIMBAH PADA PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
	Bab I: - perbaikan kubah Umi Masalah penelitian - Data & lampiran - identifikasi masalah - Rumus & tpm		9/3-19
	Bab II: - Deskripsi data perbuku - Hasil wawancara & survey - pembahasan rumus dan Rumus - Hasil penelitian & pteori		13/3-19
	Bab III: - perbaikan kesimpulan & saran - kesimpulan seperti di Rumus hasil - smrt smrt		16/3-19
	Daftar Isi: Abstrak, kata pengantar - Daftar Isi - Daftar pustaka		18/3-19
	Selamat Bantu, Ace & jeda pd bag kya ttpan		

Medan, Maret 2019

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(ELIZAR SINAMBELA, SE., M.Si)

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKA Y : Eka Yusdiantari

NPM : 14051 : 1405170314

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS
BIAYA PENGOLAHAN LIMBAH PADA PT.
PERKENUNAN NUSANTARA III (PERSERO)
MEDAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2019

Yang membuat pernyataan



EKA YUSDIANTARI

ABSTRAK

EKA YUSDIANTARI. NPM. 1405170314. Analisis Perlakuan Akuntansi atas Biaya Pengolahan Limbah pada PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Medan, Skripsi. 2019.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komponen biaya-biaya atas pengolahan limbah yang dikeluarkan dan untuk mengetahui serta menganalisis perlakuan akuntansi atas biaya pengolahan limbah. Perlakuan akuntansi atas biaya pengolahan limbah dimulai dari identifikasi, pengakuan, pengukuran atau penilaian serta pengungkapan dan penyajian pada laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Medan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Jenis data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, dimana data primer berupa wawancara terkait dengan tujuan dari penelitian ini. Sedangkan data sekunder adalah laporan keuangan yang berupa laporan laba/rugi dan catatan atas laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan membandingkan PP RI No. 27 Tahun 2012, UU RI No. 32 Tahun 2009, Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 09 Tahun 2000 serta teori dan konsep yang ada dan mendukung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Medan sudah mengidentifikasi biaya-biaya yang dikeluarkan terkait dengan pengolahan limbah, dalam mengakui biaya pengolahan limbah dimasukkan sebagai komponen biaya umum dan administrasi dengan pertimbangan bahwa biaya lingkungan berkaitan langsung dengan operasi umum dan administrasi perusahaan. Dalam mengukur dan menilai biaya pengolahan limbah sebesar kos yang dikeluarkan (Historical Cost) dan disajikan bersama dengan biaya-biaya yang sejenis dalam laporan laba/rugi. Pengungkapan masalah lingkungan hidup (dalam hal pengolahan limbah) dalam laporan keuangan sampai saat ini belum diatur secara khusus dalam standar akuntansi yang berlaku, sehingga penerapannya sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan.

***Kata Kunci:** Perlakuan Akuntansi, Akuntansi Lingkungan, Biaya Pengolahan Limbah.*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi guna memenuhi salah satu persyaratan kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga Skripsi yang berjudul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Biaya Pengolahan Limbah Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan“** ini dapat terselesaikan dengan cukup baik.

Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kedua orangtua penulis, Ayahanda Hermayadi dan Ibunda Yusnidar yang menjadi sumber inspirasi penulis yang selalu memberikan dukungan serta do'a. Selain itu, pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE, MM, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Fitriani Saragih, SE, M. Si selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Elizar Sinambela, SE, M. Si selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing saya dalam proses penyusunan Skripsi ini.

5. Seluruh Staf pengajar dan Pegawai pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Seluruh Staff dan Karyawan Bagian Akuntansi dan Teknologi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.
7. Buat sahabat-sahabatku Nur Aini, Ranti Putri Sandi, Rini Julianti, Suci Handayani, Suci Pertiwi, Suci Pransisca yang telah memberi dukungan serta semangat satu sama lain dalam penyusunan Skripsi ini.
8. Dan terakhir buat keluarga kecilku dikost kak salmi, ketri, muli, ewida, shinta, lia, putri dan ratih.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini dalam penyajiannya masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Medan, Maret 2019

Penulis

EKA YUSDIANTARI

1405170314

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II : LANDASAN TEORI.....	12
A. Uraian Teoritis.....	12
1. Pengertian Akuntansi Lingkungan	12
2. Tujuan dan Penerapan Akuntansi Lingkungan.....	13
3. Fungsi dan Peran Akuntansi Lingkungan.....	15
4. Manfaat Akuntansi Lingkungan	17
5. Perbedaan Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Lingkungan.....	18
6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	19
a. Pengertian AMDAL.....	19
b. Tujuan dan Manfaat AMDAL.....	20
7. Biaya Lingkungan	22
8. Perlakuan Akuntansi Atas Biaya Pengolahan Limbah	23
a. Pengidentifikasian.....	24
b. Pengakuan	25
c. Pengukuran atau Penilaian	26
d. Pengungkapan dan Penyajian.....	27
B. Penelitian Terdahulu	31
C. Kerangka Berpikir	34

BAB III : METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan Penelitian	36
B. Definisi Operasional Variabel.....	36
C. Tempat dan Waktu Penelitian	37
1. Tempat Penelitian.....	37
2. Waktu Penelitian	37
D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian	40
1. Proses Pengolahan Limbah	40
1) Limbah Cair	41
2) Limbah Padat	42
3) Limbah B3.....	42
2. Perlakuan Akuntansi atas Biaya Pengolahan Limbah.....	42
a. Identifikasi Komponen Biaya Pengolahan Limbah	42
b. Pengakuan Biaya Pengolahan Limbah.....	45
c. Pengukuran atau Penilaian Biaya Pengolahan Limbah.....	46
d. Pengungkapan dan Penyajian Biaya Pengolahan Limbah	47
B. Pembahasan.....	48
a. Identifikasi Komponen Biaya Pengolahan Limbah	48
b. Pengakuan Biaya Pengolahan Limbah.....	50
c. Pengukuran atau Penilaian Biaya Pengolahan Limbah.....	51
d. Pengungkapan dan Penyajian Biaya Pengolahan Limbah	53
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	31
Tabel III.1 Pelaksanaan Penelitian.....	37
Tabel IV.1 Daftar Biaya Pengolahan Limbah PTPN III (PERSERO) MEDAN	44
Tabel IV.2 Pengukuran Biaya Pengolahan Limbah	46
Tabel IV.3 Perbandingan Identifikasi Biaya Pengolahan Limbah	49
Tabel IV.4 Perbandingan Pengakuan Biaya Pengolahan Limbah	51
Tabel IV.5 Perbandingan Pengukuran Biaya Pengolahan Limbah	52
Tabel IV.6 Perbandingan Penyajian Biaya Pengolahan Limbah	54

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1 Kerangka Berpikir	35
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama ini, keberadaan perusahaan dianggap memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat pada umumnya. Selain dapat memenuhi kebutuhan hidup, perusahaan juga menjadi sarana penyedia lapangan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan.

Tujuan utama didirikannya perusahaan adalah untuk memperoleh laba semaksimal mungkin untuk kelangsungan hidup perusahaan, namun disamping itu perusahaan juga harus memperhatikan bagaimana keadaan lingkungan. Hal ini jika tidak diperhatikan dengan serius maka akan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Lingkungan diakui atau tidak diakui memiliki kontribusi yang cukup besar dalam mendukung aktivitas bisnis perusahaan, disisi lain aktifitas bisnis sering kali berdampak pada penurunan kualitas lingkungan. Pencemaran dan limbah produksi merupakan salah satu contoh dampak negatif dari operasional industri (Desi: 2018).

Limbah diartikan sebagai sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan produksi. Bentuk dari limbah produksi bermacam-macam, dapat berupa limbah industri cair, padat, dan gas. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan kemungkinan memiliki dampak bagi lingkungan sehingga limbah tersebut memerlukan pengolahan dan penanganan yang khusus oleh perusahaan agar tidak menyebabkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan tempat perusahaan

beroperasi. Pemerintah juga secara tegas telah mengatur pengelolaan limbah industri agar tidak mengganggu lingkungan hidup orang banyak, diantaranya adalah dengan melakukan pengolahan limbah industri dengan tepat seperti diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat terutama bagi perusahaan.

Dalam pengolahan dan penanganan limbah produksi, perusahaan perlu menerapkan sistem akuntansi lingkungan karena menangani dampak yang mungkin akan ditimbulkan dari limbah itu sendiri pasti memerlukan biaya-biaya tersendiri, sebagai kontrol terhadap tanggung jawab perusahaan sebab pengolahan limbah yang dilakukan oleh perusahaan memerlukan pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian/pelaporan biaya pengolahan limbah dari hasil kegiatan operasional perusahaan. Akuntansi lingkungan merupakan bidang ilmu akuntansi yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mengakui, mengukur, menilai, menyajikan/melaporkan akuntansi lingkungan.

Kompasiana (2017) menyatakan bahwa, akuntansi lingkungan itu sendiri merupakan sebuah tanggung jawab sosial yang dilakukan sebuah perusahaan terhadap lingkungan yang berada disekitar perusahaan. Biaya-biaya yang terkait dengan lingkungan umumnya adalah biaya pengelolaan limbah, pembuangan limbah, pembuatan instalasi, biaya kepada pihak ketiga, biaya perijinan dan sebagainya.

Perhitungan biaya dalam penanganan limbah produksi diperlukan adanya perlakuan akuntansi yang sistematis dan benar. Penerapan akuntansi lingkungan bertujuan untuk mengetahui besarnya biaya lingkungan yang dikeluarkan dalam pengolahan limbah tersebut. Dengan diterapkannya sistem akuntansi lingkungan,

perusahaan dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan dan dapat mengontrol tanggung jawab perusahaan dalam menjaga lingkungan sekitar perusahaan, serta perusahaan juga dapat mengontrol limbah produksi yang dikeluarkan agar limbah tersebut tidak mencemari lingkungan sekitar perusahaan. Informasi-informasi yang disediakan oleh akuntansi lingkungan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang sifatnya strategis.

Namun saat ini di Indonesia, pengungkapan mengenai akuntansi lingkungan masih belum diatur secara khusus dalam standar akuntansi, artinya pelaporan informasi lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan masih bersifat sukarela. Akan tetapi IAI menjelaskan bahwa laporan tahunan harus mengakomodasi kepentingan para pengambil keputusan (Mulyani, 2013).

Walaupun belum adanya standar akuntansi yang mengatur secara khusus mengenai akuntansi lingkungan, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang mengenai Lingkungan Hidup. Peraturan Perundang-undangan mengenai Lingkungan Hidup adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang merupakan pembaharuan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta pedoman penyusunan AMDAL berdasarkan pada Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) mendukung pemerintah untuk menjaga, melindungi dan merawat lingkungan. Bapepam mengeluarkan peraturan tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten dan perusahaan publik, dimana salah satu poinnya mencakup tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang isinya tentang lingkungan hidup seperti sistem pengelolaan limbah perusahaan (Harry, 2012).

Guna mendukung kebijakan berkelanjutan, wajib sifatnya untuk dilakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). AMDAL merupakan kajian mengenai dampak positif dan negatif dari suatu rencana kegiatan/proyek, yang dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah suatu kegiatan/proyek layak atau tidak layak lingkungan. Melalui AMDAL, dampak-dampak penting yang diperkirakan akan timbul dapat diidentifikasi, dievaluasi dan diupayakan langkah-langkah penanganannya, sehingga AMDAL dapat menjadi pedoman bagi pemrakarsa dan instansi/lembaga yang terlibat dan terkait dengan rencana tersebut, terutama dalam menentukan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup baik pada skala tapak proyek maupun skala regional. Kedudukan AMDAL dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup sangat penting dan strategis karena merupakan instrument pencegahan pencemaran lingkungan yang menentukan mutu lingkungan.

Penelitian ini mengambil objek penelitian pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan. Perusahaan ini merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Dalam kegiatan produksinya, Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Perkebunan Nusantara III menghasilkan produk berupa Minyak Kelapa

Sawit/Crude Palm Oil (CPO). Dalam menghasilkan CPO, PKS juga menghasilkan limbah. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan produksi PKS adalah berupa limbah cair dan limbah padat. Untuk limbah padat berupa tandan kosong (tankos), ampas dan cangkang (berasal dari proses pengolahan inti sawit) dan limbah cair PKS.

Limbah produksi yang dihasilkan memungkinkan memiliki dampak bagi lingkungan yakni pencemaran jika tidak diolah dengan baik. Untuk itu, memerlukan pengolahan dan penanganan yang khusus agar tidak menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan yang akan timbul akibat limbah produksi yang dihasilkan. Untuk limbah cair, perusahaan telah memiliki Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) yang berupa kolam limbah yang letaknya jauh dari pemukiman warga, dioperasikan untuk menampung limbah cair yang dihasilkan PKS.

Pengelolaan limbah ini membutuhkan pengeluaran biaya yang biasanya disebut dengan biaya lingkungan. Pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan biaya lingkungan ini sudah diterapkan dan dilaporkan pada laporan keuangan namun masih menyatu pada biaya umum dan administrasi. Informasi ini diperoleh berdasarkan wawancara dengan pihak PT. Perkebunan Nusantara III Medan dan data dari laporan keuangan, tepatnya pada Catatan atas Laporan Keuangan (data terlampir).

Menurut Juartha (2009) menyatakan bahwa biaya lingkungan perlu dilaporkan secara terpisah berdasarkan klasifikasi biayanya. Hal ini dilakukan supaya laporan biaya lingkungan dapat dijadikan informasi yang informatif untuk mengevaluasi kinerja operasional perusahaan terutama yang berdampak pada lingkungan.

Gunawan (2012:48) menyatakan, biaya lingkungan adalah biaya yang ditimbulkan akibat kualitas lingkungan yang rendah sebagai akibat dari proses produksi yang dilakukan perusahaan. Biaya lingkungan perlu dilaporkan secara terpisah berdasarkan klasifikasi biayanya. Hal ini dilakukan supaya laporan biaya lingkungan dapat dijadikan informatif untuk mengevaluasi kinerja operasional perusahaan terutama yang berdampak lingkungan..

Kemungkinan untuk memuat seluruh biaya yang telah dikeluarkan dalam pos khusus menjadi sebuah neraca khusus tetap ada, namun meski demikian minimal dalam sebuah laporan keuangan adanya rekening khusus yang dapat menjelaskan alokasi biaya lingkungan tersebut menjadi satu kesatuan pos rekening laporan keuangan yang utuh dan secara rinci pengeluaran biaya tersebut sejak awal perencanaan proses akuntansi lingkungan sampai pada saat penyajian pemakaian biaya tersebut. (Purnomo, 2000).

Hubungan antara lingkungan dengan perekonomian memang tidak diragukan lagi. Akhir-akhir ini, *green accounting* telah mendapatkan perhatian serius dalam meningkatkan antara aktivitas usaha dengan dampak lingkungan, sehingga akan bisa disusun perencanaan strategis dan pengambilan keputusan manajemen yang tepat jika dalam laporan keuangan dicantumkan akun-akun yang terkait dengan lingkungan (Anelia, 2012:17).

Menurut Susanti (2014:3), pada perkembangannya, akuntansi tidak hanya sebatas proses pertanggungjawaban sosial lingkungan sebagai ilmu akuntansi yang relatif baru. Akuntansi lingkungan menunjukkan biaya riil atas input dan proses

bisnis serta memastikan adanya efisiensi biaya, selain itu juga dapat digunakan untuk mengukur biaya kualitas dan jasa. Tujuan utamanya adalah dipatuhinya perundangan perlindungan lingkungan untuk menemukan efisiensi yang mengurangi dampak dan biaya lainnya.

Susanti (2014:3) menyatakan, dalam akuntansi secara umum yang terjadi adalah pengukuran dan pencatatan terhadap dampak yang timbul dari hubungan antara perusahaan dengan pelanggan atau konsumen produk namun dalam akuntansi lingkungan lebih cenderung menyoroti masalah aspek sosial atau dampak dari kegiatan secara teknis, misalnya pada saat penggunaan alat atau bahan baku perusahaan yang kemudian akan menghasilkan limbah produksi yang berbahaya. Bidang ini amat penting sebab khususnya di Indonesia saat ini terlalu banyak perusahaan baik badan usaha milik negara maupun swasta yang dalam pelaksanaan operasi usaha ini menimbulkan kerusakan ekosistem karena adanya limbah produksi perusahaan yang tentu memerlukan aloksi biaya penanganan khusus hal tersebut.

Aktivitas dalam *green accounting* dijelaskan oleh Cohen dan Robbins (2011) sebagai berikut:

“Environmental accounting collects, analyzes, assesses, and prepares reports of both environmental and financial data with a view toward reducing environmental effect and cost. This form of accounting is central to many aspect of governmental policy as well. Consequently, environmental accounting has become a key aspect of green business and responsible economic development”.

Artinya, akuntansi lingkungan mengumpulkan, menganalisis, memperkirakan,

dan menyiapkan laporan baik data lingkungan maupun finansial dengan tujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dan biaya. Bentuk akuntansi ini memusat pada beberapa aspek kebijakan pemerintah sebaik mungkin. Konsekuensinya, akuntansi lingkungan menjadi aspek penting dalam konsep Green business dan pengembangan perekonomian yang bertanggungjawab.

Menurut Gunawan (2012:48), akuntansi lingkungan telah menjadi perhatian akuntan karena perusahaan perlu menyampaikan informasi mengenai aktivitas perlindungan lingkungan kepada *stakeholder*. Perusahaan tidak hanya menyampaikan informasi mengenai keuangan tetapi juga perlu memperhatikan kepentingan lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Akuntansi lingkungan adalah istilah yang berkaitan dengan di masukannya biaya lingkungan ke dalam praktek akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah. Biaya lingkungan adalah dampak baik moneter maupun non moneter yang harus dipikul sebagai akibat dari kegiatan yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Akuntansi lingkungan dipertimbangkan karena menjadi perhatian bagi pemegang saham dan adanya kesadaran lingkungan dengan cara mengurangi biaya yang berhubungan dengan lingkungan. Karena dengan perusahaan memperhatikan kualitas lingkungan maka akan memberikan ketertarikan bagi para investor untuk menanamkan modalnya ke perusahaan tersebut.

Biaya lingkungan itu sendiri adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah produk, proses, dan aktivitas lainnya di perusahaan telah memenuhi standar yang berlaku atau tidak (Septian, 2013). Dan

dalam hal ini yang dimaksud adalah penyajian biaya pengolahan limbahnya secara khusus.

Atas dasar itulah kemudian peneliti mencoba mengangkat masalah penelitian yang diberi judul “**Analisis Perlakuan Akuntansi atas Biaya Pengolahan Limbah pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalahnya yaitu : Penyajian biaya pengolahan limbahnya (biaya lingkungan) masih belum disajikan secara terpisah dalam laporan keuangannya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perlakuan akuntansi atas biaya pengolahan limbah ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas biaya pengolahan limbah pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperoleh gambaran nyata bagaimana penerapan teori-teori yang telah dipelajari terutama dalam menambah wawasan keilmuan dibidang akuntansi keuangan tentang konsep akuntansi lingkungan yang merupakan konsep baru dalam akuntansi.

2. Bagi perusahaan, khususnya PT. Perkebunan Nusantara III Medan, hasil penelitian ini dapat sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan kegiatan usahanya terutama masalah perlakuan alokasi biaya pengolahan limbah dalam kaitannya dengan kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan serta dapat memberikan masukan mengenai perlakuan akuntansi lingkungan yang tepat.
3. Bagi pihak akademis, hasil penelitian ini dapat menambah bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian lanjutan pada objek yang sama dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembacanya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pengertian Akuntansi Lingkungan

Pengertian lingkungan menurut Undang-Undang RI Nomor 32 Pasal 1 ayat 1 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”.

Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (*United States Environment Protection Agency* atau *USEPA*) menyatakan akuntansi lingkungan adalah:

“Suatu fungsi penting tentang akuntansi lingkungan adalah untuk menggambarkan biaya-biaya lingkungan supaya diperhatikan oleh para *stakeholders* perusahaan yang mampu mendorong dalam pengidentifikasian cara-cara yang dapat mengurangi atau menghindari biaya-biaya pada waktu yang bersamaan dengan usaha memperbaiki kualitas lingkungan”.

Djogo dalam Mahardhika (2017) mendefinisikan akuntansi lingkungan (*environmental accounting*) adalah istilah umum yang bersangkutan dengan biaya lingkungan terhadap setiap praktek akuntansi baik di lembaga pemerintah maupun di perusahaan. Biaya tersebut merupakan hasil dari akibat segala kegiatan perusahaan yang bersangkutan yang berkaitan dengan lingkungan. Pada dasarnya akuntansi lingkungan memang berfokus pada biaya pengembangan atau perawatan

lingkungan khususnya pada perusahaan atau lembaga yang fokus utama pekerjaan mereka berhubungan dengan lingkungan”.

Wanggono (2016) menyatakan bahwa, akuntansi lingkungan adalah suatu istilah yang berupaya untuk mengelompokkan pembiayaan yang dilakukan perusahaan atau pemerintah dalam melakukan konservatif lingkungan ke dalam pos lingkungan dan praktik bisnis perusahaan.

Berdasarkan pendapat di atas bisa dijelaskan bahwa akuntansi lingkungan adalah aktivitas jasa yang memiliki peranan untuk menyediakan informasi akuntansi yang dapat dipengaruhi oleh respon perusahaan terhadap masalah yang mengancam tempat kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya dalam rangka mengukur posisi perusahaan dalam lingkungan, mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan serta strategi untuk memperbaiki posisi tersebut dalam mengubah sistem manajemen untuk menjamin perbaikan yang terus-menerus dan manajemen yang efektif.

3. Tujuan dan Penerapan Akuntansi Lingkungan

Ada beberapa maksud dikembangkannya akuntansi lingkungan, yaitu: akuntansi lingkungan merupakan sebuah alat manajemen lingkungan dan akuntansi lingkungan sebagai alat komunikasi dengan masyarakat. Tujuan akuntansi lingkungan menurut Santoso dalam Hidayati (2016) adalah sebagai berikut:

“Tujuan akuntansi lingkungan adalah untuk menyediakan informasi biaya lingkungan yang relevan bagi mereka yang memerlukan. Tujuan lain dari

pengungkapan akuntansi lingkungan berkaitan dengan kegiatan konservasi lingkungan oleh perusahaan maupun organisasi lainnya yaitu mencakup kepentingan organisasi publik dan perusahaan-perusahaan publik yang bersifat lokal”.

Menurut Hermiyetti dalam Wanggono (2016) menyatakan bahwa tujuan akuntansi lingkungan adalah:

a. Sebagai alat manajemen lingkungan

Untuk menilai keefektifan kegiatan konservasi berdasarkan ringkasan dan klasifikasi biaya konservasi lingkungan. Data akuntansi lingkungan juga digunakan menentukan biaya fasilitas pengelolaan lingkungan, menilai tingkat keluaran dan capaian tiap tahun agar menjamin perbaikan kinerja lingkungan yang berlangsung secara terus-menerus.

b. Sebagai alat komunikasi dengan masyarakat

Akuntansi lingkungan digunakan untuk menyampaikan dampak yang disampaikan kepada publik. Tanggapan dan pandangan terhadap akuntansi lingkungan dari pihak pelanggan dan masyarakat digunakan sebagai umpan balik perusahaan dalam pengelolaan lingkungan.

Biaya limbah sesungguhnya merupakan biaya variabel yang mengikuti volume limbah yang dihasilkan dan berbanding lurus dengan tingkat produksi. Ketidaktepatan perhitungan atas volume dan biaya atas bahan baku yang terbuang mengakibatkan tidak dapat dipastikannya berapa sebenarnya biaya limbah. Dengan menerapkan Akuntansi Lingkungan, akan menghitung biaya limbah sebagai biaya pengolahan ditambah biaya pembelian bahan baku. Sehingga biaya limbah yang

dikeluarkan lebih besar (sebenarnya) daripada biaya yang selama ini diperhitungkan. Sehingga perusahaan dapat meminimalisirkan pemakaian bahan baku agar tidak terbuang percuma dan akhirnya menjadi limbah dengan biaya yang diperkecil.

4. Fungsi dan Peran Akuntansi Lingkungan

Fungsi serta peran dari akuntansi lingkungan itu sendiri berupa perhitungan terhadap biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan sebuah tanggung jawab sosial yang ditimbulkan, dan biaya yang harus dikeluarkan ini harus diketahui dan disetujui oleh pemilik perusahaan. Hadirnya akuntansi lingkungan ini untuk menuntut kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan, agar perusahaan dapat bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar perusahaan.

Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (*United States Environment Protection Agency* atau *USEPA*) menyatakan:

“Fungsi penting akuntansi lingkungan adalah untuk menyajikan biaya-biaya lingkungan bagi para *stakeholders* perusahaan, yang mampu mendorong pengidentifikasian cara-cara mengurangi atau menghindari biaya-biaya ketika pada waktu yang bersamaan, perusahaan sedang memperbaiki kualitas lingkungan”.

Fungsi dan peran akuntansi lingkungan menurut Ikhsan dalam Hidayati (2016) dibagi menjadi dua bentuk yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi internal, merupakan fungsi yang berkaitan dengan pihak internal perusahaan sendiri. Pihak internal adalah pihak yang menyelenggarakan usaha, seperti rumah tangga konsumen dan rumah tangga produksi maupun jasa lainnya.

Adapun yang menjadi faktor dominan pada fungsi internal ini adalah pimpinan perusahaan.

2. Fungsi eksternal, merupakan fungsi yang berkaitan dengan aspek pelaporan keuangan. Pada fungsi ini faktor penting yang perlu diperhatikan perusahaan adalah pengungkapan dari hasil kegiatan konservasi lingkungan dalam bentuk data akuntansi. Informasi yang diungkapkan merupakan hasil yang diukur secara kuantitatif dari kegiatan konservasi lingkungan.

Secara tidak langsung, akuntan dan akuntansi lingkungan dapat berperan dalam membantu masalah penanganan lingkungan. Gray dalam Mulyani (2013) menyatakan, peranan akuntansi lingkungan itu sendiri adalah membantu manajemen mengatasi masalah lingkungan melalui lima tahap, yaitu:

1. Sistem akuntansi yang ada saat ini dapat dimodifikasi untuk mengidentifikasi masalah lingkungan dalam hubungannya dengan masalah pengeluaran seperti biaya kemasan, biaya hukum, biaya sanitasi dan biaya lain-lain yang berkenaan dengan efek lingkungan.
2. Hal-hal yang negatif dari sistem akuntansi saat ini perlu diidentifikasi, seperti masalah penilaian investasi yang belum mempertimbangkan masalah lingkungan.
3. Sistem akuntansi perlu memandang jauh ke depan dan lebih peka terhadap munculnya isu-isu lingkungan yang selalu berkembang.

4. Pelaporan keuangan untuk pihak eksternal dalam proses berubah, seperti misalnya berubah ukuran kerja perusahaan di masyarakat.
5. Akuntansi yang baru dari sistem informasi memerlukan pengembangan seperti pemikiran tentang kemungkinan adanya “*eco balance sheet*”.

5. Manfaat Akuntansi Lingkungan

Akuntansi lingkungan tidak hanya menyediakan data biaya yang penting untuk menilai dampak kegiatan keuangan manajemen, tetapi juga arus informasi fisik (penggunaan bahan baku dan daftar biaya pengiriman barang-barang) bantuan menandai dampak lingkungan. Contoh dari beberapa biaya yang terkait dengan lingkungan dan manfaatnya bagi akuntansi manajemen lingkungan meliputi:

- a. Pencegahan Polusi
- b. Desain untuk lingkungan
- c. Penilaian dasar hidup lingkungan atau pembiayaan atau desain
- d. Jaringan manajemen lingkungan.
- e. Pembelian dengan sarat lingkungan
- f. Memperluas produk yang dihasilkan atau tanggung jawab produk
- g. Sistem manajemen lingkungan
- h. Evaluasi kinerja lingkungan dan tolak ukur

i. Pelaporan kinerja lingkungan

6. Perbedaan Akuntansi Konvensional dengan Akuntansi Lingkungan

Perbedaan Akuntansi konvensional dengan Akuntansi lingkungan adalah menurut Craig & Ben Gorgon dalam Rossje (2006) untuk akuntansi konvensional memiliki beberapa karakteristik yaitu:

- 1) Mengidentifikasi entitas akuntansi.
- 2) Mengaitkan aktivitas ekonomi dari entitas akuntansi.
- 3) Mencatat kejadian ekonomi (*economic events*).
- 4) Hanya diperuntukkan secara khusus untuk investor dan lainnya yang berkepentingan dengan entitas akuntansi (*stockholder*).

Sedangkan karakteristik akuntansi lingkungan adalah:

- 1) Mengidentifikasi kejadian ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 2) Entitas akuntansi.
- 3) Memperhatikan dampak kejadian ekonomi, sosial dan lingkungan demi kelangsungan hidup organisasi perusahaan.
- 4) Menghasilkan informasi untuk para stakeholders seperti masyarakat, publik, karyawan atau buruh dari generasi akan datang.

Dalam akuntansi lingkungan berorientasi pada *flow* yang mendasarkan pada analisis sebab akibat secara sistematis khususnya biaya yang terkait dengan output,

seperti: emisi, pembuangan sampah dan limbah yang dijadikan input perusahaan. Namun dalam akuntansi konvensional, biaya-biaya tersebut diberlakukan sebagai biaya overhead (*factory overhead cost*) dan dialokasikan secara terpisah.

7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

a. Pengertian AMDAL

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) adalah suatu proses dalam studi formal untuk memperkirakan dampak lingkungan atau rencana kegiatan proyek dengan bertujuan memastikan adanya masalah dampak lingkungan yang di analisis pada tahap perencanaan dan perancangan proyek sebagai pertimbangan bagi pembuat keputusan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 pasal 1 ayat 2 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Undang-Undang RI Nomor 32 pasal 1 ayat 11 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa:

“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”.

Tata cara penyusunan AMDAL telah diatur di dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan Hidup, serta dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. AMDAL disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan. Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Pasal 5 ayat 1 BAB II Bagian Kedua tentang penyusunan dokumen AMDAL dan UKL-UPL, menyatakan bahwa “Penyusunan AMDAL dituangkan ke dalam dokumen AMDAL yang terdiri atas:

- i. Kerangka Acuan (KA) adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil perlingkupan.
- ii. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
- iii. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- iv. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha atau kegiatan.

b. Tujuan dan Manfaat AMDAL

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan BAB I Pasal 1 Ayat 1, menjelaskan bahwa “Izin Lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha

dan/atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan”. Tujuan Amdal merupakan penjagaan dalam rencana usaha atau kegiatan agar tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pembelian ijin usaha dan/atau kegiatan.

Manfaat dari AMDAL adalah:

- i. Bahan perencanaan pembangunan wilayah.
- ii. Membantu proses dalam pengambilan keputusan terhadap kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan.
- iii. Memberikan masukan dalam penyusunan rancangan rinci teknis dari rencana usaha atau kegiatan.
- iv. Memberi masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- v. Memberikan informasi terhadap masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha atau kegiatan.
- vi. Memberikan alternatif solusi minimalisasi dampak negatif.
- vii. Digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberi ijin usaha atau kegiatan.

8. Biaya Lingkungan

Biaya lingkungan dapat diartikan sebagai biaya yang muncul dalam usaha mencapai tujuan seperti pengurangan biaya lingkungan yang meningkatkan pendapatan, meningkatkan kinerja lingkungan yang perlu dipertimbangkan saat ini dan yang akan datang.

Hansen-Mowen (2011:413) mendefinisikan biaya lingkungan adalah “biaya-biaya yang terjadi karena kualitas lingkungan yang buruk atau kualitas lingkungan yang buruk mungkin akan terjadi. Maka, biaya lingkungan berhubungan dengan kreasi, deteksi, perbaikan dan pencegahan degradasi lingkungan”.

Definisi biaya lingkungan menurut Susenohaji dalam Mahardhika (2017) adalah:

“Biaya lingkungan adalah sebagai biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan berhubungan dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan perlindungan yang dilakukan. Biaya lingkungan mencakup biaya-biaya internal (berhubungan dengan pengurangan proses produksi untuk mengurangi dampak lingkungan) maupun eksternal (berhubungan dengan perbaikan kerusakan akibat limbah yang ditimbulkan)”.

Biaya-biaya yang terdapat dalam akuntansi biaya lingkungan:

1. Biaya pemeliharaan dan penggantian dampak akibat limbah dan gas buangan (*waste and emission treatment*), yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memelihara, memperbaiki, mengganti kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah perusahaan.

2. Biaya pencegahan dan pengelolaan lingkungan (*prevention and enviromental management*) adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah dan mengelola limbah untuk menghindari kerusakan lingkungan.
3. Biaya pembelian bahan untuk bukan hasil produksi (*material purchase value of non-product*) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan yang bukan hasil produksi dalam rangka pencegahan dan pengurangan dampak limbah dari bahan baku produksi.
4. Biaya pengelolaan untuk produk (*processing cost of non-product output*) ialah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pengolahan bahan yang bukan hasil produk.
5. Penghematan biaya lingkungan (*environmental revenue*) merupakan penghematan biaya atau penambahan penghasilan perusahaan sebagai akibat dari pengelolaan lingkungan.

Dalam PSAK No. 33 (revisi 2011) Tahun 2012 tentang Akuntansi Pertambangan Umum menyatakan bahwa “Biaya pengelolaan lingkungan hidup adalah biaya yang timbul atas usaha mengurangi dan mengendalikan dampak negatif kegiatan pertambangan, dan biaya rutin lainnya”.

9. Perlakuan Akuntansi atas Biaya Pengolahan Limbah

Sebelum mengaplikasikan pembiayaan untuk pengelolaan dampak lingkungan seperti pengelolaan limbah, perencanaan lingkungan dan efek sosial masyarakat lainnya perusahaan perlu merencanakan tahap pencatatan

pembiayaan tersebut. Tahap-tahap ini dilakukan agar dalam pengalokasian anggaran yang telah direncanakan untuk satu periode akuntansi dapat diterapkan dengan efektif dan efisien. Winarno dalam Mahardhika (2017) menyatakan bahwa “Pencatatan untuk mengelola segala macam yang berkaitan dengan limbah sebuah perusahaan di dahului dengan perencanaan yang akan dikelompokkan dalam pos-pos tertentu sehingga dapat diketahui riil setiap tahunnya”.

a. Pengidentifikasian

Wahyudi (2014) berpendapat bahwa pertama kali perusahaan hendak menentukan biaya untuk pengelolaan biaya penanggulangan eksternalitas yang mungkin terjadi dalam kegiatan operasional usahanya adalah dengan mengidentifikasi dampak-dampak negatif. Sebagai contoh misalkan sebuah pabrik kelapa sawit yang diperkirakan akan menghasilkan limbah berbahaya dalam proses pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi sehingga perlunya penanganan khusus, dengan cara mengidentifikasi limbah yang mungkin ditimbulkan antara lain: limbah padat dan limbah cair, yang berasal dari kegiatan tersebut.

Undang-Undang RI Nomor 32 Pasal 43 ayat 2 (b) Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Instrumen pendanaan lingkungan hidup meliputi, dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup. Maksudnya adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan”.

Dalam Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Bab III paragraf 7 menyatakan:

“Pembiayaan untuk melaksanakan RKL merupakan tugas dan tanggung jawab dari pemrakarsa rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. Pembiayaan tersebut antara lain mencakup: (a) biaya investasi misalnya pembelian peralatan pengelolaan lingkungan hidup serta biaya untuk kegiatan teknis lainnya; (b) biaya personil dan biaya operasional; (c) biaya pendidikan serta latihan keterampilan operasional”.

Setiap biaya-biaya lingkungan yang ada, diklasifikasikan oleh perusahaan secara berbeda. Jadi setiap perusahaan masih memiliki pandangan berbeda dari penentuan biaya akuntansi lingkungan. Hal ini dikarenakan akan lebih memudahkan manajemen untuk lebih fokus dalam menentukan keputusan.

b. Pengakuan

Definisi pengakuan (*recognition*) dalam Arfan Ikhsan dkk. (2015:100) adalah:

“Pengakuan ialah pencatatan suatu jumlah rupiah (biaya) ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan tercermin dalam laporan keuangan. Jadi pengakuan berhubungan dengan masalah apakah suatu transaksi dicatat atau tidak. Standar akuntansi mengatur tentang pengakuan ini dengan memberikan beberapa kriteria pengakuan yaitu syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi agar suatu transaksi dapat diakui serta saat pengakuan”.

Apabila sudah diidentifikasi selanjutnya diakui sebagai akun atau rekening biaya pada saat penerimaan manfaat dari sejumlah nilai yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan lingkungan tersebut. Menurut Yanto dalam

Hidayati (2016) menyatakan bahwa elemen-elemen yang telah diidentifikasi selanjutnya diakui sebagai rekening dan disebut sebagai biaya. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk mencegah lingkungan dari pencemaran dapat di akui sebagai beban dalam laporan laba rugi.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Pasal 43 ayat 1 (d) Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

“Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi meliputi, internalisasi biaya lingkungan hidup. Internalisasi biaya lingkungan hidup adalah memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan”.

Singkatnya, biaya yang digunakan oleh perusahaan setiap bulannya untuk mengelola limbah perusahaan dengan cara mengambil dari biaya yang sudah dicadangkan (dianggarkan) sebelumnya yakni melalui pembiayaan dibayar dimuka. Selain itu, dalam PSAK 57 tentang kewajiban diestimasi, kewajiban kontinjensi, dan aset kontinjensi, menyatakan juga memungkinkan mengakui beban sebelum dikeluarkannya biaya, dalam rangka memenuhi ketentuan hukum atau aspek konstruktif lainnya.

c. Pengukuran atau Penilaian

Definisi pengukuran (*measurement*) atau penilaian (*valuation*) dalam Arfan Ikhsan dkk. (2015:100) adalah:

“Penentuan jumlah rupiah sebagai unit pengukur pada suatu objek yang timbul dari suatu transaksi keuangan. Jumlah rupiah hasil pengukuran akan dicatat untuk dijadikan data dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi memberikan berbagai dasar pengukuran yang dapat

digunakan untuk dapat menentukan berapa jumlah rupiah yang harus diperhitungkan dan dicatat dalam suatu transaksi atau berapa jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu elemen atau pos laporan keuangan”.

Menurut Suwardjono dalam Mulyani (2013), pengukuran (*measurement*) adalah penentuan angka atau satuan pengukur terhadap suatu objek untuk menunjukkan makna tertentu dari objek tersebut. Pada umumnya, perusahaan mengukur jumlah dan nilai atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengelolaan lingkungan dengan menggunakan satuan moneter yang sudah ditetapkan sebelumnya dan sebesar yang dikeluarkan dengan mengacu pada realisasi biaya yang telah dikeluarkan pada periode sebelumnya, sehingga akan diperoleh jumlah dan nilai yang tepat sesuai kebutuhan riil perusahaan setiap periode.

Dalam hal ini, pengukuran yang dilakukan untuk menentukan kebutuhan pengalokasian pembiayaan tersebut sesuai dengan kondisi perusahaan yang bersangkutan, karena dalam SAK belum ada yang mengatur secara khusus tentang pengukuran biaya lingkungan. Walaupun tidak ada dasar yang khusus dalam pengukuran atau penilaian biaya lingkungan yang terjadi dalam perusahaan, maka pengukuran atau penilaian biaya tersebut berdasarkan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan masing-masing.

d. Pengungkapan dan Penyajian

Defini pengungkapan dan penyajian (*disclosure and presentation/display*) dalam Arfan Ikhsan dkk. (2015:101) adalah:

“Pengungkapan berarti pembeberan hal-hal informasi yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui laporan

keuangan utama dan cara-cara penyampaiannya. Standar pengungkapan suatu kejadian biasanya menetapkan apakah suatu informasi harus disajikan secara terpisah dari laporan utama, apakah informasi tersebut digabungkan dengan pos laporan yang lain, apakah suatu pos laporan perlu dirinci atau apakah informasi tersebut cukup disajikan dalam bentuk catatan kaki (footnote)".

Apabila PSAK belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka penyajian secara wajar dapat dicapai melalui pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam PSAK No. 1 paragraf 14 Tahun 2015 tentang Penyajian Pelaporan Keuangan, yaitu:

"Beberapa entitas juga menyajikan, dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup adalah signifikan dan ketika karyawan dianggap sebagai kelompok pengguna laporan keuangan yang memegang peranan penting. Laporan yang disajikan diluar laporan keuangan tersebut adalah diluar dari ruang lingkup SAK".

Menurut Haryono dalam Hidayati (2016), perusahaan dapat menyajikan kepedulian lingkungan dalam laporan keuangan guna membantu menciptakan kesan positif terhadap perusahaan dimata pemodal, pemerintah, dan masyarakat. Model komprehensif yang dapat dijadikan sebagai alternatif model pelaporan keuangan lingkungan secara garis besar dapat dikategorikan dalam empat macam model, antara lain:

1. Model normatif, model ini mengakui dan mencatat biaya-biaya lingkungan secara keseluruhan yakni dalam lingkup satu ruang rekening secara umum bersama rekening lain yang serumpun. Biaya-biaya tersebut disisipkan dalam sub-sub unit rekening biaya tertentu dalam laporan keuangannya.

2. Model hijau, menetapkan biaya dan manfaat tertentu atas lingkungan bersih. Selama suatu perusahaan menggunakan sumber daya, perusahaan tersebut harus mengeluarkan biaya sebesar konsumsi atas biaya sumber daya, Proses tersebut memaksa perusahaan menginternalisasikan biaya pemakaian sumber daya meskipun mekanisme pengakuan dan pengungkapan belum memadai dan kemudian melaporkan biaya tersebut dalam laporan keuangan yang terpisah dari laporan keuangan induk untuk memberikan penjelasan mengenai pembiayaan lingkungan di perusahaannya.
3. Model intensif lingkungan, model pelaporan ini mengharuskan adanya pelaksanaan kapitalisasi atas biaya perlindungan dan reklamasi lingkungan. Pengeluaran akan disajikan sebagai investasi atas lingkungan sedangkan aktiva terkait lingkungan tidak di depresiasi sehingga dalam laporan keuangan selain pembiayaan yang diungkapkan secara terpisah juga memuat mengenai catatan-catatan aktiva tetap yang berhubungan dengan lingkungan yang dianggap sebagai investasi untuk lingkungan.
4. Model aset nasional, model ini mengubah sudut pandang akuntansi dari tingkat perusahaan (skala mikro) ke tingkat nasional (skala makro), sehingga dimungkinkan untuk meningkatkan tekanan terhadap akuntansi untuk persediaan dan arus sumber daya alam.

Dalam model ini dapat ditekankan bahwa selain memperdulikan lingkungan dalam pengungkapannya secara akuntansi, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk

menginterpretasikan pembiayaan lingkungan tersebut sebagai aset nasional yang dipandang sebagai tanggungjawab nasional.

Dalam hal ini perusahaan dapat memilih alternatif model varian dalam menentukan sikap dan bentuk tanggungjawab sosial sesuai dengan proposional masing-masing perusahaan. Namun secara substansial pertanggungjawaban lingkungan tetap menjadi pertimbangan utama setiap perusahaan.

Winarno dalam Wida (2015) berpendapat bahwa pada umumnya, akuntansi konvensional mencatat biaya-biaya tambahan ini sebagai biaya overhead yang berarti belum dilakukan spesialisasi rekening untuk pos biaya lingkungan. Akuntansi lingkungan menuntut adanya alokasi pos khusus dalam pencatatan rekening pada laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan sehingga dalam pelaporan akuntansi keuangan akan muncul bahwa pertanggung jawaban sosial yang dilakukan oleh perusahaan tidak sebatas pada retorika namun telah sesuai praktis didalam pengelolaan sisa hasil operasional perusahaan. PSAK 33 (revisi 2011) paragraf 14 Tahun 2012 tentang Akuntansi Pertambangan Umum yang juga mengatur tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH). Hal-hal yang wajib diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan akuntansi sehubungan dengan :
 - i. Perlakuan akuntansi atas pembebanan biaya limbah
 - ii. Metode penyusutan prasarana pengelolaan limbah
2. Kegiatan PLH yang telah dan yang sedang berjalan

3. Adanya kewajiban bersyarat sehubungan dengan PLH

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti dalam menyusun penelitian ini tidak terlepas dari acuan/penelitian terdahulu yang berkaitan dengan akuntansi lingkungan khususnya biaya pengolahan limbah. Berikut ini merupakan penelitian penelitian terdahulu yang menjadi acuan oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

Tabel II.1.

Tinjauan Penelitian Terdahulu

No.	Nama & Tahun	Judul	Hasil	Sumber
1.	Wida Rahayu S (2015)	“Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Biaya Pengolahan Limbah Pabrik Gula Lestari Nganjuk PT. Perkebunan Nusantara X”	Perusahaan dalam perlakuan akuntansi atas biaya pengolahan limbah untuk pengungkapan biaya pengolahan limbah tidak mencatat secara rinci, dan terkait dengan aset yang berkaitan dengan biaya pengolahan limbah tidak mengungkapkan secara rinci.	Artikel Ilmiah Mahasiswa Universitas Jember
2.	Nita Sri Mulyani (2013)	“Analisis Penerapan Akuntansi Biaya Lingkungan pada Pabrik Gondoruken	Perusahaan dalam mengakui biaya lingkungan dimasukkan ke dalam komponen biaya produksi. Perusahaan	Skripsi Universitas Jember

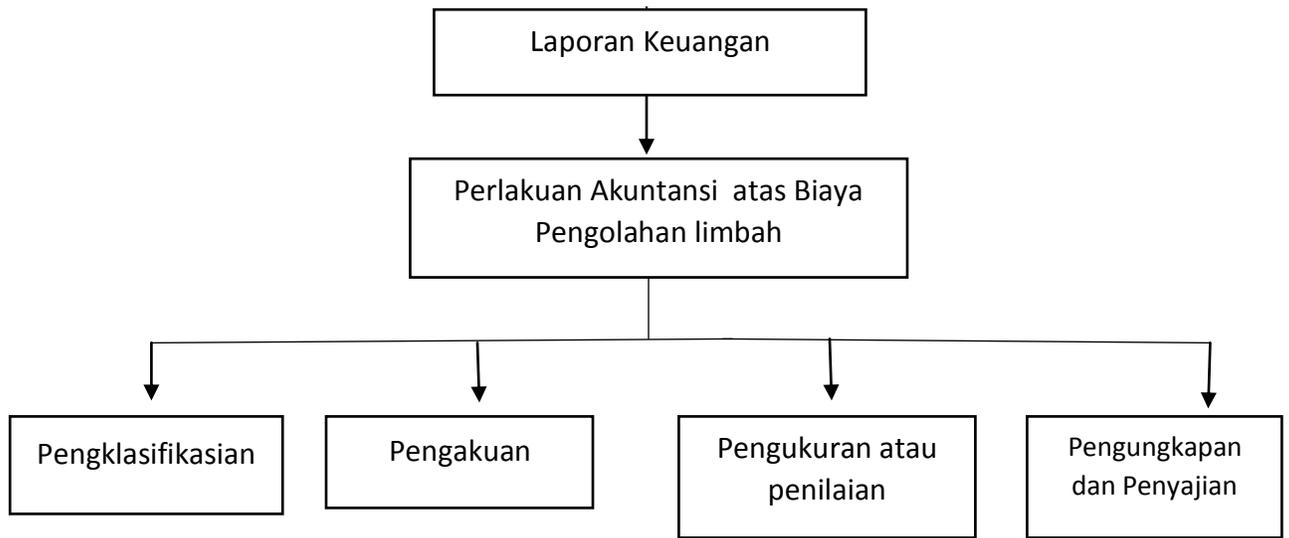
		Terpentin (PGT) Garahan-Jember”	dalam mengukur dan menilai biaya lingkungan sebesar kos yang dikeluarkan dan disajikan bersama-sama dengan biaya-biaya yang sejenis dalam laporan keuangan dan informasi mengenai biaya lingkungan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan.	
3.	Muhammad Naufal Ridlo (2016)	“Perlakuan Akuntansi atas Pengelolaan Limbah pada Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Banyuwangi”	Elemen biaya atas pengelolaan limbah RSUD dalam hal ini pada IPAL, dibagi menjadi tanah, gedung dan bangunan, peralatan penunjang dan mesin, dan biaya operasional. Untuk perlakuan akuntansinya sudah sesuai dengan PSAK yang terkait.	Artikel Ilmiah Mahasiswa Universitas Jember
4.	Fitri Nilasari (2014)	“Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah” (PG	Perusahaan telah melakukan pengklasifikasian biaya lingkungan (dalam hal pengelolaan limbah) dan	Artikel Ilmiah Mahasiswa Universitas Jember

		Djatiroto)	telah melakukan tahapan perlakuan akuntansi lingkungan.	
5	Nurul Hidayati (2016)	“Analisis Penerapan Akuntansi Biaya Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara V Sei Rokan”	Perusahaan mengakui biaya lingkungan (dalam hal biaya operasional pengelolaan limbah) dimasukkan dalam komponen biaya produksi dan perusahaan telah menerapkan akuntansi biaya lingkungan sesuai dengan konsep yang ada.	Artikel Ilmiah Mahasiswa Universitas Pasir Pangaraian, Rokan Hulu
6.	Riska Amalia (2010)	“Perlakuan Akuntansi Biaya Pengolahan Limbah dalam Laporan Keuangan” (Studi Kasus Pada PT. Panca Mitra Multi Perdana Situbondo)	Perusahaan tidak membuat laporan biaya lingkungan yang spesifik, dan perusahaan hanya mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan lingkungan pada laporan manajemen kualitatif.	Skripsi Universitas Jember
7.	Sanjaya A Amahardhika (2017)	“Analisis Perlakuan Biaya Pengolahan limbah pada PT. Indo Acidatama, Tbk Kabupaten	Perusahaan dalam mengakui biaya lingkungan dimasukkan ke dalam komponen biaya produksi serta penerapannya sesuai dengan	Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta

		Karanganyar”	konsep yang ada.	
8.	Desi Ratnasari (2018)	“Analisis perlakuan akuntansi atas biaya pengolahan limbah	Perusahaan tidak membuat laporan biaya lingkungan yang spesifik, dan dalam mengakui biaya lingkungan dimasukkan ke dalam komponen biaya produksi.	Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

C. Kerangka Berpikir

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan serta wawancara secara langsung untuk mengetahui bagaimana aktivitas operasional pada pabrik kelapa sawit Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara III terutama dalam hal limbah produksinya. Kemudian peneliti melihat laporan keuangan perusahaan yang didukung dengan hasil wawancara tentang biaya-biaya pengolahan limbah, serta untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi perusahaan atas biaya pengolahan limbah tersebut. Setelah itu peneliti melakukan analisis tentang perlakuan akuntansi atas biaya pengolahan limbah yang dilakukan perusahaan dalam hal pengidentifikasian, pengakuan, pengukuran atau penilaian, serta penyajian dan pengungkapan kemudian diperbandingkan terhadap kajian teoritis sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang Pengolahan Limbah serta teori-teori dan konsep yang ada dan mendukung.



Gambar II.1

Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah menganalisis data untuk permasalahan variabel-variabel mandiri. Peneliti tidak bermaksud untuk menganalisis hubungan atau keterkaitan variabel. Menurut Sugiyono (2005:21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Penelitian deskriptif ini dimaksudkan agar peneliti dapat memberikan gambaran mengenai perlakuan akuntansi atas biaya pengolahan limbah dan penyajiannya dalam laporan keuangan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

B. Definisi Operasional Variabel

Untuk mewujudkan akuntansi lingkungan tersebut adapun tahapan perlakuan akuntansinya adalah pengidentifikasian, pengakuan, pengukuran atau penilaian, serta pengungkapan dan penyajian.

Adapun yang dimaksud dengan biaya pengolahan limbah adalah sumber daya yang dikorbankan dan diukur dengan harga dalam suatu usaha untuk mengerjakan sisa proses produksi atau air buangan supaya menjadi lebih sempurna (Mindarwasih, 2001: 31).

2. Dokumentasi

Memperoleh data langsung dari perusahaan yang bersifat umum yang terkait obyek penelitian, dengan melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen dan laporan-laporan perusahaan yang berkaitan dengan penelitian serta mengumpulkan data dan informasi melalui buku-buku, jurnal, dan internet.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan peneliti untuk menyampaikan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.
2. Mengidentifikasi data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian yaitu data berupa laporan keuangan serta wawancara tentang biaya pengolahan limbah.
3. Menganalisis data yang telah diperoleh yaitu data laporan keuangan yang telah didukung oleh data hasil wawancara untuk mengetahui dan memastikan apa saja biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan bagaimana perlakuan akuntansi atas biaya pengolahan limbah menyangkut pengidentifikasian, pengakuan, pengukuran atau penilaian, pengungkapan dan penyajiannya di laporan keuangan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Proses Pengolahan Limbah

PT. Perkebunan Nusantara III Medan merupakan salah satu pabrik yang bergerak dalam pengolahan Kelapa Sawit menjadi minyak mentah, yang juga memiliki kepedulian lingkungan dan selalu berusaha memenuhi standar yang berlaku untuk mengantisipasi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan operasional perusahaan.

Limbah diartikan sebagai sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan produksi. Limbah produksi yang dihasilkan oleh kegiatan Pabrik memiliki kemungkinan bahwa limbah tersebut berbahaya bagi lingkungan, sehingga memerlukan pengolahan dan penanganan khusus agar tidak menyebabkan dampak negatif yang lebih besar terhadap lingkungan sekitar pabrik beroperasi.

PT. Perkebunan Nusantara III Medan begitu menyadari betapa pentingnya pengolahan limbah sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar Pabrik beroperasi. Perusahaan telah melakukan berbagai cara untuk melakukan pengolahan limbah operasional perusahaan guna untuk mencegah atau mengurangi pencemaran lingkungan dan menjaga kualitas

lingkungan sekitar perusahaan, dimana limbah yang dihasilkan perusahaan berupa limbah cair, limbah padat dan limbah B3.

Jenis limbah Pabrik PT. Perkebunan Nusantara III dan pengolahannya adalah sebagai berikut:

1) Limbah Cair

Limbah cair yang dihasilkan Pabrik Kelapa Sawit merupakan sisa hasil buangan proses produksi berupa cairan serta bahan-bahan buangan lain yang tercampur maupun terlarut dalam air. Penanganan limbah cair yang dilakukan perusahaan adalah dengan cara:

- a) Limbah cair yang keluar dari Pabrik Kelapa Sawit diangkut kelapangan (afd) sebagai *Land Application* (Aplikasi Tanah).
- b) Pada tahap ini, sebelum dijadikan sebagai *Land Application* (Aplikasi Tanah) limbah cair sebelumnya telah diproses dahulu melalui proses Anaerob. Pengolahan air limbah Anaerob bertujuan untuk merombak bahan organik dalam air limbah menjadi bahan yang lebih sederhana yang tidak berbahaya.
- c) Dimana ada sekitar 10 kolam, diambil sampel kolam ketiga (*primery*) yang kemudian air limbah diendapkan sampai tercapai kisaran pH 6,5-7,5 dan diharapkan BODnya 3500mg/l-5000mg/l.
- d) Setelah air limbah diendapkan, limbah cair tadi kemudian dipompa ke dalam (yang disebut perusahaan *Longbad*) untuk mengurangi pedangkalan kolam limbah dan juga menjadi pupuk untuk tanaman Kelapa Sawit perusahaan.

e) Dengan pH 6,5-7,5 telah memenuhi standar baku mutu lingkungan limbah yaitu pH 6-9, sehingga layak apabila jika dibuang ke sungai.

2) Limbah Padat

Limbah padat yang dihasilkan oleh Pabrik Kelapa Sawit adalah berupa tandan kosong (tankos), ampas dan cangkang. Untuk Tankos, setelah keluar dari PKS langsung dikemas dan diangkut dengan truk ke lapangan (afd) sebagai Mulsa (penutup untuk membuat tanaman tumbuh dengan baik), sedangkan untuk yang berupa ampas dan cangkang dijadikan sebagai bahan bakar PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Pabrik guna memanaskan air didalam boiler.

3) Limbah B3

Limbah B3 yang dihasilkan diantaranya adalah Minyak pelumas (oli) bekas/kotor, karung goni plastik bekas pupuk, jerigen bekas racun (pestisida), batere bekas dan *oil filter*.

2. Perlakuan Akuntansi atas Biaya Pengolahan Limbah

a. Identifikasi Komponen Biaya Pengolahan Limbah

Pada dasarnya biaya pengolahan limbah selalu berhubungan dengan biaya operasional. Penggambaran biaya lingkungan pada suatu perusahaan itu tergantung dari niat perusahaan itu sendiri untuk menggunakan informasi yang dihasilkan dari informasi lingkungan. Begitu pula dengan perusahaan yang bergerak pada bidang manufaktur. Biaya lingkungan merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk

mencegah terjadinya kerusakan lingkungan atau biaya yang dikeluarkan jika terjadi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah produksinya

PT. Perkebunan Nusantara III mengidentifikasi limbah yang dihasilkan menjadi tiga bagian yaitu berupa limbah padat, limbah cair dan limbah B3. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Andi Satriono selaku Staf Sub Bagian Evaluasi dan Monitoring Pengelolaan Lingkungan Bagian Teknologi dalam wawancara, yaitu:

“Limbah yang dihasilkan dari proses produksi adalah berupa limbah padat dan limbah cair. Untuk limbah padat berupa tandan kosong (tankos), ampas dan cangkang (berasal dari proses pengolahan inti sawit) dan limbah cair dan juga limbah B3 PKS”.

Khusus limbah cair, PTPN III Unit Usaha Pabatu telah mempunyai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berupa kolam limbah. Pengadaan IPAL ini sebagai bentuk tanggungjawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Jika hal tersebut tidak dicegah, maka akan menimbulkan kerusakan pada lingkungan sekitar. Proses pengolahan limbah Pabrik Kelapa Sawit Pabatu menimbulkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Perusahaan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Nico selaku Staf Konsolidasi Laporan Keuangan dalam wawancara, yaitu:

“Perusahaan mengidentifikasi biaya pengolahan limbah diambil dari Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) karena memang seluruh biaya harus ada RKAP nya. Biaya yang dikeluarkan untuk pengolahan limbah, oleh perusahaan dijadikan satu dalam laporan keuangan umum yang dibuat perusahaan seperti berupa biaya gaji, biaya beli bahan penolong dan biaya pelengkap lainnya”.

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan bahwa biaya-biaya pengolahan limbah yang dikeluarkan oleh perusahaan dikelompokkan kedalam sub-sub biaya yang sejenis dalam laporan keuangan umum perusahaan. Berikut ini adalah biaya-

biaya yang timbul pada proses pengolahan limbah PT. Perkebunan Nusantara III

Medan:

Tabel IV.1.

Daftar Biaya Pengolahan Limbah PTPN III (PERSERO) Medan

(Desember 2017)

Nomor Rekening	Nama Rekening
	PENGENDALIAN LINGKUNGAN
00.00	Gaji, Tunjangan dan Beban Sosial Karyawan Pelaksana
00.01	Honorarium/Akomodasi
00.04	Pemeliharaan instalasi listrik
00.05	Bahan/Barang Pelengkap
00.06	Listrik dan Air
00.07	Pengukuran/Analisa
00.08	Pembuangan Limbah/Sampah
00.09	Audit Internal
00.10	Audit External
00.19	Lain-lain
01.03	Pemeliharaan mesin-mesin dan perlengkapan
01.07	Pengukuran/Analisa
01.19	Lain-lain
03.00	Gaji, Tunjangan dan Beban Sosial Karyawan Pelaksana
03.05	Bahan/Barang Pelengkap
03.07	Pengukuran/Analisa
03.08	Pembuangan Limbah/Sampah
03.09	Audit Internal
03.10	Audit External
03.19	Lain-lain
05.00	Gaji, Tunjangan dan Beban Sosial Karyawan Pelaksana
05.11	Persiapan Lahan
05.16	Memupuk (HK dan Bahan)
05.17	Bahan dan Alat

05.19	Lain-lain
-------	-----------

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2019

Semua biaya-biaya pengolahan limbah yang dikeluarkan dimasukkan kedalam sub unit dengan nomor rekening 00.00 – 05.19 disajikan dalam satu akun yaitu “Pengendalian Lingkungan” karena biaya pengolahan limbah timbul akibat dari kegiatan operasional pabrik dalam pengendalian lingkungan. Kemudian disajikan dalam laporan keuangan pada laporan laba rugi.

Dan pada dasarnya kehadiran akuntansi lingkungan yaitu untuk menyempurnakan atau menutupi keterbatasan yang mungkin ada dalam praktek akuntansi saat ini. Yang menjadi kendalanya adalah masih tidak adanya standar yang baku untuk mewajibkan setiap perusahaan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di sekitarnya khususnya soal penanganan limbah sehingga menciptakan keberagaman sistem pencatatan di masing-masing perusahaan atau instansi yang menghasilkan limbah.

b. Pengakuan Biaya Pengolahan Limbah

Pengakuan berhubungan dengan masalah transaksi yang akan dicatat atau tidak kedalam sistem pencatatan, sehingga pada akhirnya transaksi tersebut akan berpengaruh pada laporan keuangan. PT. Perkebunan Nusantara III Medan mengakui elemen tersebut sebagai biaya apabila biaya tersebut sudah digunakan untuk operasional pabrik dalam mengelola lingkungan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Nico selaku Staf Konsolidasi Laporan Keuangan dalam wawancara, yaitu:

“Selama proses pengolahan limbah berlangsung, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengolahan limbah disini diakui sebagai biaya. Dimana perusahaan mengakui biaya pada saat terjadinya transaksi dalam kegiatan operasional pabrik, sebagai bukti perusahaan langsung membukukan transaksi atas biaya yang dikeluarkan tersebut”. Bahwa PT.Perkebunan Nusantara III Medan mengakui biaya terkait dengan pengolahan limbah tersebut apabila biaya tersebut sudah digunakan untuk operasional pabrik dalam mengelola lingkungan.”

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, biaya terkait pengolahan limbah juga membentuk rekening tersendiri yaitu dengan membebankan biaya tersebut dalam nama rekening “Pengendalian Lingkungan” dan digolongkan kedalam Biaya umum dan administrasi serta akan muncul pada laporan laba rugi.

c. Pengukuran atau Penilaian Biaya Pengolahan Limbah

PT. Perkebunan Nusantara III Medan dalam mengukur biaya-biaya pengolahan limbah menggunakan satuan moneter (rupiah) berdasarkan kos yang dikeluarkan dan diambil dari realisasi anggaran periode sebelumnya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Nico selaku Staf Konsolidasi Laporan Keuangan dalam wawancara, yaitu sebagai berikut:

“Dalam mengukur biaya yang dikeluarkan perusahaan terutama terkait dengan biaya pengolahan limbah, menggunakan satuan rupiah sesuai dengan yang sudah dikeluarkan. Dan mengacu pada laporan biaya realisasi anggaran periode sebelumnya”.

Berikut adalah tabel dalam pengukuran atau penilaian biaya pengolahan limbah yang dikeluarkan dalam satu periode:

Tabel IV.2.

Pengukuran Biaya Pengolahan Limbah

Nomor Rekening	Nama Rekening	Pengukuran
	PENGENDALIAN LINGKUNGAN	
00.00	Gaji, Tunjangan dan Beban Sosial Karyawan Pelaksana	Historical Cost
00.01	Honorarium/Akomodasi	Historical Cost
00.04	Pemeliharaan instalasi listrik	Historical Cost
00.05	Bahan/Barang Pelengkap	Historical Cost
00.06	Listrik dan Air	Historical Cost
00.07	Pengukuran/Analisa	Historical Cost
00.08	Pembuangan Limbah/Sampah	Historical Cost
00.09	Audit Internal	Historical Cost
00.10	Audit External	Historical Cost
00.19	Lain-lain	Historical Cost
01.03	Pemeliharaan mesin-mesin dan perlengkapan	Historical Cost
01.07	Pengukuran/Analisa	Historical Cost
01.19	Lain-lain	Historical Cost
03.00	Gaji, Tunjangan dan Beban Sosial Karyawan Pelaksana	Historical Cost
03.05	Bahan/Barang Pelengkap	Historical Cost
03.07	Pengukuran/Analisa	Historical Cost
03.08	Pembuangan Limbah/Sampah	Historical Cost
03.09	Audit Internal	Historical Cost
03.10	Audit External	Historical Cost
03.19	Lain-lain	Historical Cost
05.00	Gaji, Tunjangan dan Beban Sosial Karyawan Pelaksana	Historical Cost
05.11	Persiapan Lahan	Historical Cost
05.16	Memupuk (HK dan Bahan)	Historical Cost
05.17	Bahan dan Alat	Historical Cost
05.19	Lain-lain	Historical Cost

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2019

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa seluruh komponen biaya pengolahan limbah pada Desember Tahun 2017 mengacu pada alokasi biaya yang di keluarkan

pada periode sebelumnya. Dengan hal tersebut, biaya yang di anggarkan pada tahun ini tidak akan berbeda jauh dengan realisasi anggaran sebelumnya.

d. Pengungkapan dan Penyajian Biaya Pengolahan Limbah

Pengungkapan berkaitan dengan masalah bahwa suatu informasi keuangan atau kebijakan akuntansi tersebut diungkapkan atau tidak. Perusahaan mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan biaya pengolahan sesuai dengan kebijakan kantor pusat (induk). Dikarenakan PT. Perkebunan Nusantara III Medan mengikuti kebijakan kantor induk maka dalam memberikan pengungkapan mengenai biaya pengolahan limbah yang masuk kedalam golongan Biaya umum dan administrasi melalui Laporan Laba Rugi Perusahaan.

Penyajian berkaitan dengan masalah bagaimana suatu informasi keuangan akan disajikan dalam laporan keuangan. Selama ini biaya-biaya yang timbul akibat pengolahan limbah masuk ke dalam golongan Biaya umum dan administrasi. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Nico selaku Staf Konsolidasi Laporan Keuangan dalam wawancara, yaitu:

“Perusahaan sendiri tidak membentuk laporan tersendiri untuk biaya pengolahan limbah. Biaya yang dikeluarkan oleh pabrik terutama tentang pengolahan, oleh perusahaan dijadikan satu dalam laporan keuangan umum. Biaya tersebut disajikan dalam laporan laba rugi masuk ke dalam biaya umum dan administrasi”.

Berdasarkan keterangan tersebut, ini berarti bahwa perusahaan dalam menyajikan informasi lingkungan terutama dalam hal biaya pengolahan limbah disajikan bersama-sama dengan biaya-biaya lainnya yang sejenis dalam satu laporan keuangan umum perusahaan.

B. Pembahasan

Perlakuan Akuntansi atas Biaya Pengolahan Limbah

Berdasarkan data penelitian dapat diketahui bahwa perlakuan akuntansi atas biaya pengolahan limbah pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan sudah diterapkan namun dalam penyajiannya belum sesuai dengan PSAK No. 1 paragraf 14 Tahun 2015. Kondisi ini dapat dijelaskan dengan analisa sebagai berikut :

a. Identifikasi Komponen Biaya Pengolahan Limbah

PT. Perkebunan Nusantara III Medan dalam melaporkan biayanya terutama dalam hal biaya yang terkait dengan biaya pengolahan limbah digolongkan sebagai biaya upah dan sosial, biaya bahan penolong dan biaya pelengkap lainnya. Setelah melakukan penelusuran, diketahui bahwa PT. Perkebunan Nusantara III Medan sudah mengeluarkan biaya-biaya yang berkaitan dengan pengolahan limbahnya dan juga sudah mempunyai akun tersendiri dalam biaya pengolahan limbah, biaya tersebut mempunyai realisasi, realisasi dilakukan dalam periode berjalan dalam rekening “Pengendalian Lingkungan” dan disajikan dalam laporan keuangan pada laporan laba rugi.

Pengidentifikasian biaya dilakukan berdasarkan pada biaya yang timbul atau dibayarkan selama pengolahan limbah terjadi. Penelitian ini akan mengidentifikasi setiap komponen biaya pengolahan limbah pada perusahaan dengan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPKL) Bab III

paragraf 7. Berikut adalah perbandingan antara biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT. Perkebunan Nusantara III Medan dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

Tabel IV.3.

Perbandingan Identifikasi Biaya Pengolahan Limbah

Menurut Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 09 Tahun 2000	Menurut PT.Perkebunan Nusantara III Medan
<p>“Pembiayaan untuk melaksanakan RKL merupakan tugas dan tanggung jawab dari pemrakarsa rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. Pembiayaan tersebut antara lain mencakup : (a) biaya investasi misalnya pembelian peralatan pengelolaan lingkungan hidup serta biaya untuk kegiatan teknis lainnya; (b) biaya personil dan biaya operasional; (c) biaya pendidikan serta latihan keterampilan operasional.”</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Upah dan Biaya Sosial 2. Biaya Bahan Penolong 3. Biaya Pelengkap Lainnya, seperti biaya pembelian peralatan

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa PT. Perkebunan Nusantara III Medan sudah mengidentifikasi biaya pengolahan limbahnya secara jelas dan sesuai dengan Standar Aturan yang berlaku di Indonesia. Identifikasi biaya telah sesuai dengan bukti-bukti yang ada dan dapat diketahui bahwa PT. Perkebunan Nusantara III Medan sudah mencatat biaya-biaya dari kegiatan pengolahan limbah produksinya.

b. Pengakuan Biaya Pengolahan Limbah

Pengakuan biaya pengolahan limbah yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara III Medan diakui sebagai biaya ketika biaya tersebut sudah terjadi atau digunakan dalam kegiatan operasional. Hal ini berarti, PT. Perkebunan Nusantara III

Medan mengakui biaya pengolahan limbah ketika transaksi terkait biaya tersebut terjadi, bukan ketika dikeluarkan oleh perusahaan. Biaya terkait pengolahan limbah membentuk rekening sendiri yaitu dengan membebankan biaya tersebut dalam nama rekening “Pengendalian Lingkungan” dan digolongkan kedalam Biaya umum dan administrasi serta akan muncul pada laporan laba rugi. Berikut ini adalah perbandingan antara pengakuan menurut Undang-Undang RI Nomor 32 Pasal 43 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menurut PT. Perkebunan Nusantara III Medan:

Tabel IV.4.

Perbandingan Pengakuan Biaya Pengolahan Limbah

Menurut Undang-Undang RI Nomor 32 Pasal 43 Tahun 2009	Menurut PT. Perkebunan Nusantara III Medan
<p>“Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi meliputi, internalisasi biaya lingkungan hidup. Internalisasi biaya lingkungan hidup adalah memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.”</p>	<p>“Selama proses pengolahan limbah berlangsung, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengolahan limbah disini diakui sebagai biaya. Biaya terkait pengolahan limbah membentuk rekening sendiri yaitu dengan membebankan biaya tersebut dalam nama rekening “Limbah” dan digolongkan kedalam Biaya Pengolahan karena terjadi akibat dari kegiatan produksi pabrik serta akan muncul pada laporan laba rugi pada harga pokok penjualan pada sub Biaya Langsung.”</p>

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2019

Berdasarkan perbandingan tersebut, pengakuan atas biaya pengolahan limbah PT. Perkebunan Nusantara III Medan telah sesuai dengan UU RI sebagai Standar Aturan yang berlaku di Indonesia. Dengan memasukkan Biaya terkait pengolahan

limbah ke dalam perhitungan atau akun Biaya Pengolahan karena terjadi akibat dari kegiatan produksi pabrik.

c. Pengukuran atau Penilaian Biaya Pengolahan Limbah

PT. Perkebunan Nusantara III Medan dalam mengukur nilai dan jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan terkait dengan biaya pengolahan limbah menggunakan satuan moneter (rupiah) berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan dan biaya tersebut mengacu pada laporan realisasi anggaran periode sebelumnya. Pencatatan yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara III Medan adalah memasukkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengolahan limbah ke dalam akun “Pengendalian Lingkungan” yaitu biaya umum dan administrasi. Berikut adalah perbandingan antara pengukuran atas biaya pengolahan limbah yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara III Medan dengan teori pengukuran menurut Suwardjono dalam Mulyani (2013):

Tabel IV.5.

Perbandingan Pengukuran Biaya Pengolahan Limbah

Menurut Suwardjono	Menurut PT. Perkebunan Nusantara III Medan
“Pengukuran (<i>measurement</i>) adalah penentuan angka atau satuan pengukur terhadap suatu objek untuk menunjukkan makna tertentu dari objek tersebut. Pada umumnya, perusahaan mengukur jumlah dan nilai atas biaya –biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengelolaan lingkungan dengan menggunakan satuan moneter yang sudah ditetapkan sebelumnya dan sebesar yang dikeluarkan dengan mengacu pada realisasi biaya yang telah dikeluarkan pada periode sebelumnya, sehingga akan diperoleh jumlah dan nilai yang yang tepat sesuai kebutuhan riil perusahaan setiap periode.”	“Dalam mengukur biaya yang dikeluarkan perusahaan terutama terkait dengan biaya pengolahan limbah, menggunakan satuan rupiah sesuai dengan yang sudah dikeluarkan. Dan mengacu pada laporan biaya realisasi anggaran periode sebelumnya atau sering disebut dengan <i>historical cost</i> .”

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2019

Berdasarkan perbandingan pada tabel diatas, pengakuan atas biaya pengolahan limbah PT. Perkebunan Nusantara III Medan telah sesuai dengan teori Suwardjono, yaitu mengukur menggunakan satuan rupiah dan mengacu pada realisasi anggaran periode sebelumnya (*historical cost*). Karena masih belum adanya standar khusus yang mengatur tentang pengukuran mengenai biaya lingkungan dalam hal biaya pengolahan limbah, maka pengukuran biaya pengolahan limbah ini berdasarkan oleh kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing perusahaan.

d. Pengungkapan dan Penyajian Biaya Pengolahan Limbah

Penyajian biaya lingkungan dalam hal biaya pengolahan limbah di dalam laporan keuangan dapat dilakukan dengan nama rekening yang berbeda-beda karena tidak ada ketentuan yang baru untuk nama rekening untuk memuat alokasi pembiayaan lingkungan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selama ini PT. Perkebunan Nusantara III Medan dalam menyajikan biaya pengolahan limbah dalam kelompok biaya pengolahan didalam sub-sub yang sejenis dalam laporan laba rugi.

Dalam PSAK No. 1 paragraf 14 Tahun 2015 tentang Penyajian Pelaporan Keuangan menyebutkan bahwa untuk menyajikan laporan tambahan mengenai informasi lingkungan, namun laporan tambahan ini diluar dari ruang lingkup SAK. PT. Perkebunan Nusantara III Medan belum menyajikan laporan mengenai informasi lingkungan secara khusus. Namun, perusahaan mengikuti kebijakan sesuai dengan kebijakan kantor pusat (induk) serta aturan yang berlaku di Indonesia mengenai bagaimana dalam pengelolaan limbah produksi. Menurut Haryono dalam jurnal Hidayati (2016), terdapat empat model penyajian biaya lingkungan yakni Model Normatif, Model Hijau, Model Intensif Lingkungan dan Model Aset Nasional. Berikut adalah perbandingan antara penyajian atas biaya pengolahan limbah yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara III Medan dengan teori penyajian menurut Haryono :

Tabel IV.6.

Perbandingan Penyajian Biaya Pengolahan Limbah

Menurut Haryono	Menurut PT. Perkebunan Nusantara III Medan
<ol style="list-style-type: none">1. Model Normatif : Model normatif mengakui dan mencatat biaya-biaya lingkungan secara keseluruhan yakni dalam lingkup satu ruang rekening secara umum bersama rekening lainyang serumpun. Biaya-biaya serumpun tersebut disisipkan dalam sub-sub unit rekening biaya tertentu dalam laporan keuangannya.2. Model Hijau : Menetapkan biaya dan manfaat tertentu atas lingkungan bersih.3. Model Intensif Lingkungan : Pengeluaran akan disajikan sebagai investasi atas lingkungan sedangkan aktiva terkait lingkungan tidak didepresiasi.4. Model Aset Nasional : selain memperdulikan lingkungan dalam pengungkapannya secara akuntansi, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk menginterpretasikan pembiayaan lingkungan tersebut sebagai asset nasional.	Menyajikan biaya pengolahan limbah secara keseluruhan dalam kelompok biaya pengolahan didalam sub-sub yang sejenis bersama biaya lainnya dalam laporan laba rugi.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2019

Berdasarkan perbandingan pada tabel diatas, penyajian atas biaya pengolahan limbah PT. Perkebunan Nusantara III Medan sesuai dengan teori Haryono, yaitu menunjukkan bahwa perusahaan lebih condong menggunakan metode Model Normatif pada teori penyajian menurut Haryono.

PSAK Nomor 33 (revisi 2011) paragraf 14 tahun 2012 tentang Pertambahan Umum yang juga mengatur tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH), informasi mengenai biaya-biaya yang ada pada laporan keuangan termasuk biaya pengolahan limbah diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Dan diketahui bahwa, PT. Perkebunan Nusantara III Medan mengikuti kebijakan sesuai dengan kebijakan kantor pusat (induk) yang dimana dalam Catatan Atas Laporan Keuangan sudah menjelaskan komponen-komponen biaya-biaya pengolahan limbah yang dikeluarkan digolongkan ke dalam Biaya Pengolahan serta masuk kedalam perhitungan biaya produksi yang disajikan ke dalam Laporan Laba Rugi pada sub Harga Pokok Penjualan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan dalam Bab sebelumnya, berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang akan dicapai maka penulis menarik dapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlakuan Akuntansi atas Biaya Pengolahan Limbah pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan adalah sebagai berikut:
 - a. PT. Perkebunan Nusantara III Medan telah melakukan tahapan perlakuan akuntansi untuk biaya pengolahan limbah. Perusahaan sudah mengidentifikasi biaya-biaya pengolahan limbah secara jelas serta klasifikasi biaya-biaya yang dikeluarkan sesuai dengan standar aturan yang berlaku di Indonesia yaitu sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPKL) Bab III paragraf 7.
 - b. Dalam pengakuan terkait dengan biaya pengolahan limbah, PT. Perkebunan Nusantara III Medan mengakui biaya-biaya terkait pengolahan limbah kedalam sub tersendiri yaitu dengan nama rekening “Pengendalian Lingkungan” dan digolongkan ke dalam Biaya umum dan administrasi dalam laporan laba rugi. Hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 32 Pasal 43 Tahun 2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana menjelaskan bahwa memasukkan biaya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi.

- c. Dalam pengukuran terkait dengan biaya pengolahan limbah yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara III Medan menggunakan satuan rupiah dan biaya-biaya yang dikeluarkan mengacu pada biaya realisasi anggaran periode sebelumnya (*historical cost*).
- d. Dalam pengungkapan dan penyajian biaya pengolahan limbah, PT. Perkebunan Nusantara III Medan telah menyajikan dan mengungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan. Menyajikan biaya pengolahan limbah dalam Biaya umum dan administrasi pada Laporan laba Rugi Perusahaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, beberapa saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya PT. Perkebunan Nusantara III Medan menyusun laporan biaya pengolahan limbah secara terpisah dari laporan keuangan umum untuk memberikan informasi yang lebih luas dan jelas bagi pengendalian kualitas lingkungan sebagai usaha peningkatan kualitas lingkungan sekitar perusahaan.
2. Diharapkan agar PT. Perkebunan Nusantara III Medan dapat menyajikan secara lebih rinci dan lebih detail dalam mengidentifikasi biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan akibat dari pengelolaan limbah perusahaan termasuk biaya mengenai

peralatan atau mesin-mesin instalasi yang digunakan dalam melakukan pengolahan limbah tersebut.

3. Dalam pengungkapan aset atas pengolahan limbah sebaiknya perusahaan menyusun secara terperinci untuk memberikan informasi yang andal dan akurat secara menyeluruh.
4. Untuk peneliti selanjutnya terkait dengan penelitian ini agar dapat menambahkan pembahasan dari sisi akuntansi manajemen, dan diharapkan agar menemukan dan menelusuri biaya lingkungan terkait pengolahan limbah dengan lebih maksimal serta dalam meneliti terkait biaya pengolahan limbah pada perusahaan/entitas yang terkait langsung dengan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amahardhika, S. A. (2017). “Analisis Perlakuan Biaya Pengolahan Limbah pada PT. Indo Acidatama, Tbk Kabupaten Karanganyar”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Amalia, Riska (2010). “Perlakuan Akuntansi Biaya”. Skripsi Universitas Jember.
- Carter, Usry (2004). Akuntansi Biaya, Jakarta : Salemba Empat.
- Harry, A. (2012). Peraturan Bapepam X. K. 6 Penyampaian Laporan. Jakarta : Salemba Empat.
- Hidayati, Nurul (2016). “Analisis Penerapan Akuntansi Biaya Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara V Sei Rokan”. Artikel Ilmiah Mahasiswa Universitas Pasir Pangaraian, Rokan Hulu.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2014). Standar Akuntansi Keuangan Per Efektif 1 Januari 2015. Cetakan Pertama. Grha, Jakarta.
- Juliandi, Azuar & Irfan (2013). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Cetakan Pertama. Bandung : Ciptapustaka Media Perintis.
- Mulyani, N. S. (2013). : “Analisis Penerapan Akuntansi Biaya Lingkungan pada Pabrik Gondoruken Terpentin (PGT) Garahan – Jember”.
- Ridlo, M. N. (2016). “Perlakuan Akuntansi atas Pengelolaan Limbah pada Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Banyuwangi”. Artikel Ilmiah Mahasiswa Universitas Jember.
- Nilasari, Fitri (2014). “Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah (PG Djatiroto)”. Artikel Ilmiah Mahasiswa Universitas Jember.

Ratnasari, Desi (2018). “Analisis Perlakuan Akuntansi atas Biaya Pengolahan Limbah pada

PT. Perkebunan Nusantara IV Unit Usaha Pabatu”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Rahayu, Wida (2015). “Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Biaya Pengolahan Limbah Pabrik Gila Lestari”. Artikel Ilmiah Mahasiswa Universitas Jember.

Supriono, R. A (1999). Akuntansi Biaya, Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.

Suardi, Arief dkk (2000). Akuntansi Biaya, Penerbit STIE TKPN, Jogjakarta.

Witjaksono, Armanto (2006), Akuntansi Biaya, Yogyakarta : Graha Ilmu.

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)

Perkebunan Nusantara III (Persero), merupakan salah satu dari 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Kegiatan usaha Perseroan mencakup usaha budidaya dan pengolahan tanaman kelapa sawit dan karet. Produk utama Perseroan adalah minyak kelapa sawit (CPO), inti sawit (kernel) dan produk hilir karet. Sejarah perseroan diawali dengan proses pengambilalihan perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda oleh Pemerintah RI pada tahun 1958 yang dikenal sebagai proses nasionalisasi perusahaan perkebunan asing menjadi Perseroan Perkebunan Negara (PPN). Pada tahun 1968, PPN direstrukturisasi menjadi beberapa kesatuan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) yang selanjutnya pada tahun 1974 bentuk Badan Hukumnya diubah menjadi PT. Perkebunan (Persero).

Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha Perusahaan BUMN, Perusahaan merestrukturisasi BUMN Subsektor Perkebunan dengan melakukan penggabungan usaha berdasarkan Wilayah Eksploitasi dan perampingan struktur organisasi. Diawali dengan langkah penggabungan Manajemen pada tahun 1994, 3 (tiga) Perkebunan yang terdiri dari PT. Perkebunan III (Persero), PT. Perkebunan IV (Persero), disatukan pengelolaannya ke dalam Manajemen PT. Perkebunan III (Persero). Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996, ketiga Perseroan tersebut digabung dan diberi nama

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) yang berkedudukan di Medan, Sumatera Utara.

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) di dirikan dengan Akte Notaris Harum Kamil, S.H., No. 36 tanggal 11 Maret 1996 dan telah disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C28331.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 Tambahan Berita Negara No. 8674 Tahun 1996.

B. Visi dan Misi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)

1. Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan agribisnis kelas dunia dengan kineja prima dan melaksanakan tata kelola bisnis terbaik.

2. Misi Perusahaan

- a. Mengembangkan industri hilir berbasis perkebunan secara berkesinambungan.
- b. Menghasilkan produk berkualitas bagi pelanggan.
- c. Memperlakukan karyawan sebagai aset strategis dan mengembangkannya secara optimal.
- d. Berupa menjadi perusahaan terpilih yang memberikan imbal hasil terbaik investor.
- e. Menjadikan perusahaan yang paling menarik untuk bermitra bisnis.
- f. Memotivasi karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan komunikasi.

- g. Melaksanakan seluruh aktivitas perusahaan yang berwawasan lingkungan.

C. Tata Nilai Perusahaan

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) memiliki komitmen untuk mengunjung tinggi integritas profesional dan melaksanakan tata nilai yang berbasis sebagai berikut :

1. *Proactivity* (proaktif)

Selalu bersikap proaktif dengan penuh inisiatif dan mengevaluasi mungkin terjadi.

2. *Excellence* (Terbaik)

Selalu memperlihatkan gairah keunggulan dan berusaha bekerja keras untuk hasil maksimal sesuai kompetensi.

3. *Team Work* (Kerjasama)

Selalu mengutamakan kerjasama tim, agar mampu menghasilkan sinergi optimal bagi perusahaan.

4. *Innovation* (Perubahan)

Selalu menghargai kreatifitas dan menghasilkan inovasi dalam metode dan produk baru.

5. *Responsibility* (Bertanggung Jawab)

Selalu bertanggung jawab atas akibat keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan.